

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo, yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan visi " Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua". Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 :

Tabel IV.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			
Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	1	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Indeks Demokrasi
	2	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Indeks Toleransi
	3	Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Indeks Gotong Royong
	4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Rasa Aman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.	1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 3: Meningkatkan kemandirian daerah		
Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	1 Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah	1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 3. Nilai Tukar Petani 4. Laju Inflasi 5. Pertumbuhan Ekonomi 6. Indeks ketahanan pangan
	2 Meningkatnya daya saing daerah	1. Produktivitas daerah 2. PDRB per kapita (juta rupiah) 3. Indeks kapasitas fiskal daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata		
Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Rata – rata lama sekolah 3. Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-45 tahun 4. Rata – rata usia harapan hidup 5. Angka kematian ibu 6. Angka kematian bayi 7. Prevalensi balita gizi kurang 8. Prevalensi balita gizi buruk 9. Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar 10. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	2 Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak 4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> 5. <i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i> 6. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran 7. Presentase Penduduk Ber KTP
	3 Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	1. Indeks Gini 2. Indeks Wiliamson
	4 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan
	5 Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) 4. Tingkat Kesempatan Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah		
Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar	1. Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Ketaatan terhadap RTRW
	2. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan.	1. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
kelompok dan antar generasi.	4. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	1. Indeks Resiko Bencana

Tabel IV.2
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.a. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Peningkatan nilai- nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
	Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
1.b. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
		Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan
1.c. Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Meneguhkan kembali budaya gotong royong sebagai sikap hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.d .Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penguatan pranata sosial dan pengembangan kemitraan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini	Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
	Transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif
		Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
	Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana	Membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
	Penataan Manajemen SDM	Membangun sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta tata kerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
		Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu
	Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan profesional
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi
		Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
		Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas
	Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.a. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
	Peningkatan dan pengembangan pertanian terpadu	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak
		Meningkatkan kelembagaan pertanian
	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	Meningkatkan produksi perikanan
	Peningkatan dan pengembangan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian	Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi
	Peningkatan kualitas produk daerah	Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor
		Mengembangkan industri hulu hilir
	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan
		Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian
3.b. Meningkatnya daya saing daerah	Penciptaan iklim kreatif, inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan	Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan
		Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kapasitas fiskal	Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)
		Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
		Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha
		Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
	Peningkatan karakter berprestasi dan mandiri serta menghargai nilai budaya	Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia
		Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat
		Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
	4.a Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan
		Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan
		Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
	Pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
		Memperkuat peran kelembagaan sosial
	Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (<i>backlog</i>)
		Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
4.b. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
	Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan
		Meningkatkan kapasitas perempuan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Mengembangkan model pendidikan ramah anak
	Optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB
		Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi
		Peningkatan KIE dan peran peer to peer grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS
	Penjaminan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
	Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
4.c. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Pemerataan pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Memperbesar aksesibilitas wilayah
		Pengembangan pusat pertumbuhan
	Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kawasan	Menciptakan desa pusat pertumbuhan
	Penataan sistem transportasi	Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok)
		Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak
4.d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
kemiskinan		Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masy miskin dan kurang mampu
4.e. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja	Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengeloan aset masy miskin dan sumberdaya lokal
		Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan
	Peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi	Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
	Penguatan pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa
		Menerapkan <i>One District One Product (ODOP)</i> dan <i>One Village One Product (OVOP)</i> sebagai basis pengembangan potensi lokal
5.a Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan
		Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
		Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment program</i>
	Meningkatkan pengelolaan persampahan seara partisipatif	Meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan persampahan
	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
5.b. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan;	Peningkatan ketersediaan energi	Peningkatan elektrifikasi rumah tangga
	Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi	Optimalisasi Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif untuk energi baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi
5.c. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Pengurangan resiko bencana

B. Prioritas Pembangunan 2018

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "**Nawa Cita**", yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2018, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu
4. Indeks Gini sebesar 0,36
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 merupakan tahun keempat dari RPJMN Tahun 2015-2019. Program pembangunan nasional untuk pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yaitu **"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**.

Peningkatan kualitas *money follow programme* dengan pendekatan holistik, tematik integratif dan spasial dituangkan dalam 10 Prioritas nasional dan 30 Program Prioritas sebagai berikut :

- I. Pendidikan
 1. Pendidikan Vokasi
 2. Peningkatan kualitas guru
- II. Kesehatan
 3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 5. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup sehat)
- III. Perumahan dan Permukiman
 6. Penyediaan Perumahan Layak
 7. Air Bersih dan Sanitasi
- IV. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- V. Ketahanan Energi
 13. EBT dan Konservasi Energi
 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
- VI. Ketahanan Pangan
 15. Peningkatan Produksi Pangan
 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk Irigasi)
- VII. Penanggulangan Kemiskinan
 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
- VIII. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara Dan Inter-moda)
 21. Pengembangan Telekomunikasi an Informatika
- IX. Pembangunan Wilayah
 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 23. Pembangunan Perdesaan
 24. Reforma Agraria
 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 26. Percepatan Pembangunan Papua
- X. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
 27. Penguatan Pertahanan
 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
 29. Kepastian Hukum
 30. Reformasi Birokrasi

2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018

Tahun 2018 yang merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dituangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**.

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2013-2018 seraya tetap mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda untuk setiap tahunnya serta untuk menjaga kesinambungan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 ditujukan untuk **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari"**. Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2018 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi **prioritas pembangunan tahun 2018**, meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis dan magang;
 - b. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
 - c. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi dengan memberikan kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi;
 - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; kondisi kerja yang kompetitif; perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
 - e. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan promosi daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.
2. Penguatan pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin, dengan fokus pada :
 - a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan

- berupa : beasiswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, perbaikan rumah tidak layak huni, listrik perumahan, jamban dan kelambu;
- b. Jaminan perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
 - c. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; pemberdayaan UMKM; permodalan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UKM; pelatihan dan keterampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja; pemberdayaan, pelatihan dan pemberian modal bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 - e. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah;
 - f. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar;
 - g. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan data PBDT 2015
3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar dengan fokus pada :
- a. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP/MTs/SMPLB.
 - b. Penyediaan pendampingan BOS untuk peningkatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - c. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/SMK/SLB.
 - d. Pendampingan akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit, Sertifikasi Tenaga Kesehatan, pendampingan masyarakat beresiko kesehatan melalui program OSOC, penyelesaian pentahapan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - f. Pengembangan Kepedulian dan kepeloporan pemuda untuk meningkatkan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a. Pengembangan komoditas padi gogo, padi lahan salinitas, jagung hibrida dan intensifikasi kedelai;
 - b. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran;
 - c. Pemanfaatan lahan melalui integrated farming system (IFS) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai;
 - d. Peningkatan penanaman dan intensifikasi tebu;
 - e. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing;
 - f. Pengembangan perikanan budidaya melalui pemanfaatan pakan mandiri dan pengembangan perikanan tangkap dengan optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

- serta terwujudnya lumbung cadangan Pemerintah Provinsi;
 - h. Peningkatan rasio Elektrifikasi (RE);
 - i. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap *energy mix* di Jawa Tengah.
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus pada:
- a. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan nasional/provinsi, ruas jalan rawan bencana, ruas jalan yang terdapat penyempitan (*bottle-neck*), ruas penghubung wilayah pantai utara-selatan, ruas jalan di perbatasan, peningkatan akses/konektivitas ke wilayah kemiskinan tinggi serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri, dan pertanian.
 - b. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) dan penataan sistem transportasi massal untuk mengatasi kemacetan.
 - c. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan sungai dan pantai serta penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, rawan banjir dan kekeringan.
 - d. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA
 - e. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (*mangrove*) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah.
 - f. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana.
 - g. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan penanggulangan bencana
 - h. Pengembangan Early Warning System bencana berbasis masyarakat
 - i. Pengembangan masyarakat tangguh bencana.
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus kepada:
- a. Pemantapan kondusivitas wilayah dan antisipasi terhadap dampak Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan berdemokrasi.
 - c. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu :
 - 1. Manajemen perubahan yang dilaksanakan antara lain melalui implementasi penetapan *agent of change* (*Kader Revolusi Mental*) dan kode etik Aparatur Sipil Negara
 - 2. Penguatan pengawasan yang bebas dari KKN melalui implementasi Aksi PPK; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media; optimalisasi SIMWAS-Online untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 - 3. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui optimalisasi penggunaan e-SAKIP; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan indikator kinerja utama dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik.

4. Penataan dan penguatan organisasi melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, penataan kelembagaan non struktural.
5. Penataan tatalaksana meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP
6. Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional, dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka.
7. Peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta selaras melalui penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; pemantauan dan evaluasi Perda/Perkada secara berkala.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi dengan menyusun Standart Operasional Procedure dan penyediaan media pengaduan masyarakat.
 - a. Peningkatan kualitas penyusunan laporan pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
 - b. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur yang tersertifikasi, kompeten, kapabel, berintegritas, serta didukung oleh sistem pembinaan karir yang jelas dan terbuka (merit system).
 - c. Peningkatan layanan publik melalui perluasan cakupan pengukuran kinerja unit layanan publik, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - d. Gerakan revolusi mental yang berorientasi pada nilai-nilai utama yaitu integritas, peningkatan etos kerja dan budaya gotong royong
 - e. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah melalui pagelaran dan pertunjukan kesenian rakyat
 - f. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS guna menangkal upaya destruktif
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan melalui pembangunan asrama atlet dan gedung terpadu II di Jatidiri.

C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 diarahkan untuk memantapkan kualitas reformasi birokrasi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan produktivitas daerah dan menurunkan angka kemiskinan.

Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 ditujukan untuk:

1. Sumberdaya manusia, dengan fokus pada :

- a. Pendidikan** dengan arah kebijakan pada meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan; meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi; meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan dengan target indikator sasaran yaitu **rata-rata lama sekolah 6,38; angka melek huruf penduduk 15 tahun ke atas sebesar 97,41**
- b. Kesehatan** dengan arah kebijakan meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan; meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan; meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga kesehatan; meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan; meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan; dengan target indikator sasaran **rata-rata usia harapan hidup 72,19; angka kematian ibu 71,14; angka kematian bayi 6,78; prevalensi balita gizi kurang 1,63%; prevalensi balita gizi buruk 0,71%.**
- c. Sosial** dengan arah kebijakan menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif; dan memperkuat peran kelembagaan sosial. Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan. Dengan target indikator sasaran **indeks gotong royong 0,58; persentase PMKS mandiri 50,10%.**
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan arah kebijakan pada pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan; meningkatkan kapasitas perempuan; meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; mengembangkan model pendidikan ramah anak. Dengan target indikator sasaran **Indeks Pembangunan Gender (IPG) 94,32 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 46,71.**
- e. Pengendalian Penduduk dan KB** dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB; meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi; meningkatkan KIE dan peran *peer to peer* grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS dengan target **TFR (Total Fertility Rate) 2,18; laju pertumbuhan penduduk 0,55**
- f. Ketenagakerjaan** dengan arah kebijakan meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja ; meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata keola lembaga penyelenggar pendidikan dan pelatihan; dengan target sasaran **tingkat pengangguran terbuka 4,82; partisipasi angkatan kerja 75,23; dependency ratio 54,60; tingkat kesempatan kerja 94,74.**

- g. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan arah kebijakan** memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil. Dengan indikator sasaran **persentase penduduk ber KTP 98,45%.**
- h. **Perpustakaan** dengan arah kebijakan meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia; dengan indikator sasaran **jumlah pengunjung perpustakaan 271.502 orang, jumlah referensi digital 1006.**
- i. **Pemuda dan Olah Raga** dengan arah kebijakan menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat; dengan indikator sasaran **persentase komunitas olahraga aktif 37%**
- j. **Kepegawaian Daerah** dengan arah kebijakan membangun sumberdaya manusia apartur yang berkinerja tinggi dan sejahtera dengan indikator sasaran **persentase capaian sasaran kinerja pegawai sesuai dengan target 87%**
- k. **Komunikasi dan Informatika** dengan arah kebijakan mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. dengan indikator sasaran **persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK 43%**

2. **Infrastruktur**, dengan fokus pada :

- a. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi); mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh; perluasan aksesibilitas wilayah; mengembangkan pusat pertumbuhan; membentuk desa pusat pertumbuhan; menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan permukiman ; **Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang 66,77%**
- b. **Perumahan dan Permukiman** dengan arah kebijakan menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog); membentuk manajemen lingkungan dan percepatan cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman; meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.; **Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar 66,92%, rasio rumah layak huni 0,90**
- c. **Perhubungan** dengan arah kebijakan mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok); dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak dengan indikator sasaran yaitu **persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 100%**

3. **Ekonomi**, dengan fokus pada :

- a. **Pangan** dengan arah kebijakan meningkatkan kemandirian pangan. Dengan target indikator sasaran **Indeks Ketahanan Pangan 87,9.**

b. Pertanian dengan arah kebijakan meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak ; meningkatkan kelembagaan pertanian.

c. Perikanan dan Kelautan dengan arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan

Indikator sasaran untuk urusan pertanian, perikanan, dan kelautan yaitu Produktivitas Daerah 30,61% dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 114.

d. Pariwisata dengan arah kebijakan mengembangkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (agro-eco-culture-tourism); dengan indikator sasaran yaitu **rata-rata lama tinggal wisatawan 2,5 hari.**

e. Perindustrian dengan arah kebijakan mengembangkan industri hulu hilir; dengan indikator sasaran yaitu **pertumbuhan industri kecil 5,8; pertumbuhan industri menengah 5%.**

f. Perdagangan dengan arah kebijakan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi; meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi; mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor. Dengan indikator sasaran yaitu **rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok sebesar 0,92.**

g. Koperasi Dan UMKM dengan arah kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif; meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha. Dengan indikator sasaran yaitu **persentase usaha mikro dan kecil terhadap UMKM 98,8%**

4. Daya Saing

a. Penanaman Modal dengan arah kebijakan meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha; mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi. Dengan indikator sasaran yaitu **nilai investasi 1,8 trilyun.**

b. Trantibum Dan Linmas / Pemerintahan Umum dengan arah kebijakan mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi; meningkatkan kesadaran tentang wonosobo sebagai kabupaten ramah HAM; meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat; meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan; mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan; memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan; memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan; mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif; mengembangkan metode penegakan perda

secara lebih partisipatif; meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan. Dengan indikator sasaran yaitu **indeks demokrasi 74; indeks toleransi > 0,49; indeks rasa aman 0,63.**

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan arah kebijakan: memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan prioritas pembangunan; mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa dengan indikator sasaran yaitu **persentase kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan 30%.**

d. Kemampuan Ekonomi Daerah dengan arah kebijakan menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo; mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan; mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah; mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah; menerapkan one district one product (ODOP) dan one village one Product (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal. Dengan indikator sasaran yaitu **persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan 14,83%.**

5. Kemiskinan, dengan fokus pada : meningkatkan perlindungan produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu; Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan kurang mampu; Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal; Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan ; Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga. Dengan target indikator sasaran **persentase angka kemiskinan 16,42%; indeks kedalaman kemiskinan 3,24; indeks keparahan kemiskinan 1,025.**

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 di atas semua program prioritas dan kegiatan diarahkan kepada upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan melalui strategi seluruh program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah daerah, serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya perumusan Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel IV.3
Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
4. Daya Saing	indeks demokrasi	74	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih	73,97%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1 Persentase pelanggaran HAM yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan PD yang melakukan layanan pemenuhan hak dasar
	Indeks toleransi	> 0,49	Program pengembangan Kemitraan wawasan kebangsaan	1 Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	73%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Setda (bagian Kesra)

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000	4,43	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengembangan Nilai Budaya	1 persentase kebudayaan /tradisi yg ditetapkan sebagai tradisi /kebudayaan daerah	50%	PD fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
				2 Persentase komunitas filantropi aktif	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
				3 Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal	65%	PD Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang dan Pengampu Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1 Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	0,65	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2 Persentase Benda/cagar budaya yang dilestarikan	55%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
				3 Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	12	PD unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengampu Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
				1 Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada	0,67	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
				2 Persentase kelompok kesenian aktif	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
4. Daya Saing	indeks gotong royong	0,58	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1 Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah	0,1	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBdes	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Setda (bagian Kesra)
4. Daya Saing	indeks rasa aman	0,63	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Persentase siskamling aktif	61%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				2 Persentase FKDM aktif	73%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	90%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ jumlah penyelesaian pelanggaran K3/ jumlah pelanggaran K3)x100%	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				3 Angka kriminalitas yang tertangani	85%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	1 Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk	0,005	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ,PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,34	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
				2 Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1,35	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Setda
				4 Persentase LINMAS terlatih		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
				5 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
				1 Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
4. Daya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	82	Program Pengembangan data/informasi			

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	2 Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik , PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda dan PD Kecamatan
				1 Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan	40%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang, PD Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang
				2 Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD dengan program dalam RKPD	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang
				4 Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	> 3 sangat tinggi	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang
				5 Presentase PD menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				6 Persentase serapan kegiatan dan anggaran	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Keuangan dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program Perencanaan Sosial Budaya	1 Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya		PD Pengampu Fungsi Perencanaan dan Litbang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan pembangunan ekonomi		PD Pengampu Fungsi Perencanaan dan Litbang
			Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam	80%	PD Pengampu Fungsi Perencanaan dan Litbang
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1 Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		PD Pengampu Fungsi Perencanaan dan Litbang
			Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	1 Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		PD Pengampu Fungsi Perencanaan dan Litbang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Penataan Kelembagaan	1 Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi	100%	PD Pengampu Fungsi Kepegawaian dan Diklat
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU)	100%	Semua PD
				2 Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	100%	Semua PD
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	100%	Semua PD
				2 Persentase aset daerah dalam kondisi baik	80%	Semua PD

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	99%	Semua PD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Rata- rata Persentase capaian sasaran kinerja pegawai dengan target	87%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program Pendidikan Kedinasan	1 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	64%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1 Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	80%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat, PD Organisasi
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan)		PD Pengampu Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat, PD Organisasi

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program penataan peraturan perundang-undangan	1 Rasio realisasi Propemperda		PD Pengampu Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat, PD Organisasi
				2 Persentase Raperda Yang disetujui DPRD		PD Pengampu Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
				3 Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup		PD Pengampu Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
				4 Persentase perbup yang ditetapkan terhadap jumlah perbub amanat Perda		PD Pengampu Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 Persentase sistem informasi PD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blue print TIK	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi.
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	2 Persentase PD yang menerapkan e-Government	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi.
			Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	1 Persentase PD yang telah menerapkan tata naskah dinas elektronik	30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				2 Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan Pelayanan Publik	1 Persentase penerapan SPP dan SOP pada PD	85%	PD Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda dan PD pelaksana layanan publik
				2 Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh PD	100%	PD Setda dan PD pelaksana layanan publik
				3 Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	100%	PD Setda dan PD pelaksana layanan publik
				4 Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				5 Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik PD	B	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda dan Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				6 Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	75	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda dan Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PD Kecamatan
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Opini BPK	WTP	PD Pengampu Fungsi Lain Pengawasan
				2 Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				3 Predikat SAKIP	B	PD Pengampu Fungsi Penunjang Pengawasan dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	85%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Pengawasan dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				5 Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, PD Pengampu Fungsi Lain Pengawasan
				1 Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Bidang Keuangan
				4 Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	menurun	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				5 Persentase Realisasi Belanja Modal	85%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				7 Rasio belanja pemeliharaan infrastruktur terhadap total belanja	Meningkat	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				8 Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	Meningkat	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				9 Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	Meningkat	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				10 Persentase realisasi belanja barang dan jasa	90%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	1 Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	9,71028	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				2 Persentase PD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	100%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
				3 Persentase PD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.	80%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
			Program Penguatan Otonomi Desa	1 Persentase desa dengan tipe swasembada		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda /Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2 Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun)	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				2 Persentase desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				3 persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kpd bupati tepat waktu	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				4 persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kpd masyarakat tepat waktu	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Peningkatan Partisipasi masy dalam membangun desa	1 Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik	40%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				2 Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	30%	PD Fungsi Penunjang Perencanaan , PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda, PD Kecamatan
			Peningkatan partisipasi perempuan	1 Persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa	5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	1 Persentase kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa	45%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				3 Persentase BPD yang membahas lap pertanggungjawaban pemerintahan desa tepat waktu	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
				4 Persentase anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,71%	PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan
				Persentase PD yang telah membentuk satgas SPIP	40%	PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan/ PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum (Setda)

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1 Peningkatan Level Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	1	PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan
				3 Rata- rata Level Maturitas SPIP PD yang mencapai level optimum		PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan
			Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1 Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system	10%	PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan
			Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1 Persentase hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK yang ditindaklanjuti	82,71%	PD Pelaksana Fungsi Penunjang Pengawasan
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1 Persentase website PD aktif		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program kerjasama informasi dan media massa	1 Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab	30	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	43%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1 Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	25%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
				2 Persentase Publikasi data/ kajian wajib yang diupdate	80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
				3 Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				4 Persentase PD yang menyediakan informasi publik wajib setiap saat	80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
			Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	1 Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
				2 Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
				3 Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	1 Pengelolaan arsip secara baku (jumlah PD yang menerapkan arsip secara baku/ jumlah PD)x100%	93%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
				2 Jumlah PD, Desa/ kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis	46,88%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
			Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1 Persentase Pelaksanaan sistem kearsipan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	55%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase PD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	80%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase zone integritas yang terbentuk	40	PD Pengampu Fungsi Penunjang Pengawasan dan PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Rata rata hari penyelesaian surat-surat kedinasan		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Umum/Setda
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2 Persentase Raperda inisiatif yang ditetapkan oleh DPRD	3	PD Setwan
				3 Persentase keputusan/peraturan DPRD yang ditetapkan oleh DPRD	27	PD Setwan
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1 Persentase kenaikan jumlah transmigran	10	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Kerjasama Pembangunan	1 Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	62,50%	PD Pengampu Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
				2 Persentase keputusan/ peraturan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD	27	PD Pengampu Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Harga Berlaku (HB) : Rp 22.003.820 juta Harga Konstan (HK) : Rp 13.667.495 juta	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase angkatan kerja yg mendapat pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi	53	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Niai Tukar Petani (NTP)	114		2 Persentase angkatan kerja mendapat pelatihan berbasis masyarakat	71%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
	Laju Inflasi	3,25		3 Persentase peserta Pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi	6%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Pertumbuhan Ekonomi	6%		4 Persentase instruktur / pamong bersertifikat kompetensi	2	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				5 Persentase Lembaga kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional	4%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Program Pendidikan Menengah	1 Persentase kompetensi keahlian SMK minimal berakreditasi B		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1 Produksi Tanaman pangan (ton)	Padi (164.793 ton); Jagung (110.504 ton); Ubi Kayu (176.557 ton); Ubi Jalar (18.501 ton)	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 produktivitas tanaman pangan/padi (ton/ha)	5,32	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				3 Jumlah produksi sayur (kwintal)	2.125.033	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				4 Jumlah produksi buah-buahan (kwintal)	1.393.477	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				5 Jumlah produksi tanaman biofarmaka (kwintal)	3.150.299	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				6 Peningkatan level sertifikasi untuk komoditas*	kedua	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				7 Jumlah produksi bunga (tangcai)	2.672.625	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				8 Jumlah produksi perkebunan (kwintal)	5.711	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 Jumlah temuan teknologi tepat guna bidang pertanian yang sudah diterapkan	5 jenis	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1 Persentase ekspor hasil pertanian terhadap total ekspor non migas	2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Peningkatan produksi hasil peternakan	1 Jumlah populasi ternak besar (ekor)	23.162	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				2 Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	281.824	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				3 Jumlah populasi Unggas (ekor)	1.537.412	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				4 Jumlah produksi susu (liter)	932,45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				5 Jumlah produksi telur (kg)	1.708.399	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				6 Jumlah produksi daging (kg)	8.879.905	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1 Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	90%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	1 Jumlah temuan teknologi tepat guna bidang pertanian yang sudah diterapkan	5 jenis	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1 Persentase kenaikan pasokan produk peternakan ke perusahaan pengolah	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Peningkatan kesejahteraan petani	1 Rasio anggota kelompok tani terhadap petani	29,23	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				2 Rasio anggota kelompok tani ternak terhadap peternak	5,33	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1 Persentase penyuluh yang memiliki pendidikan formal pertanian dan peternakan	60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Program Pengembangan budidaya perikanan	2 Persentase kenaikan luasan lahan perikanan	4%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
				3 Persentase kenaikan produk ikan konsumsi (kg)	5,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
				4 Persentase kenaikan produksi benih ikan (kg)	3,20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
				5 Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	13,56	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
			Program Pengembangan perikanan tangkap	1 Produksi Perikanan tangkap (ton)	811,636	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
			Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	1 Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	50,25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1 Persentase kenaikan pengolahan hasil perikanan (ton)		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
			Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2 Persentase ekport hasil perikanan thd total ekport non migas	4,30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
				1 Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0,92	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				2 Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,3	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1 Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar pada sembilan bahan pokok	6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan Infrastruktur Perdagangan	2 Rasio metrologi legal yang ditera / tera ulang (jenis)	22	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				1 Persentase los/kios yang dimanfaatkan	70%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				2 Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi (sesuai kewenangan pemkab)	54%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	1 Persentase kenaikan UDKM	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1 Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya	1,0%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	1 Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	0,12	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
				2 Persentase kenaikan negara tujuan ekspor	11,0%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	1 Nilai ekspor bersih perdagangan	5,3 juta USD	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Program Pengembangan industri kecil dan menengah	1 Pertumbuhan industri kecil	5,80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				2 Pertumbuhan industri menengah	5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Penataan struktur industri	3 Pertumbuhan industri besar	0	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				4 Persentase kenaikan kapasitas produksi	5,0%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				5 Persentase industri Industri kecil yang berijin	78%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				6 Persentase kenaikan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				1 Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas	33%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				2 Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	12%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	3 Persentase klaster yang memiliki SOP	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				4 Persentase kenaikan jumlah klaster	30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				1 Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				2 Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			Program Peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi	1 Jumlah produk yang berstandar nasional	1	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				2 Jumlah produk yang berstandar internasional	0	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase merk produk industri bersertifikat halal	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				4 Persentase IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product (GMP)	4,60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	1 Persentase IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	7,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
			Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	1 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM	98,8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				2 Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	6%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				3 Persentase kenaikan Tenaga kerja UMKM	0,30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	4 Persentase Pertambahan jumlah wirausaha baru	5,0%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				5 Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	2,5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				1 Persentase kenaikan Jumlah UMKM	9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				2 Persentase kenaikan Aset UMKM (juta Rp)	9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				3 Persentase kenaikan Omset UMKM (juta Rp)	9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Persentase kenaikan Aset koperasi (juta Rp)	4,40%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase kenaikan Omset koperasi (juta Rp)	4,40%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				3 Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	70%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				4 Persentase koperasi aktif terhadap jumlah koperasi	69%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
3. Ekonomi	Indeks ketahanan pangan	88,6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Skor PPH	88	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				2 Rata-rata konsumsi pangan per kapita (kg/kapita/th)	2230	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
				3 Rata-rata konsumsi protein nabati (kg/kapita/th)	73	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan	4 Rata-rata konsumsi protein hewani (kg/kapita/th)	44	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				5 Jumlah lumbung pangan	25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				6 Jumlah desa mandiri pangan	35	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				1 Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan	97	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
				1 Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi makanan	13,45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
3. Ekonomi	Produktivitas Total Daerah	30,61	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	89%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Pangan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (program penyediaan fasilitas kreasi bagi orang kreatif)	1 Jumlah Komunitas ekonomi kreatif	6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	PDRB per kapita	17,26 juta Rp		2 Persentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang/arena kreasi	60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Indeks kapasitas Fiskal	0,18	Peningkatan produksi bagi orang kreatif menuju skala usaha yang layak	1 Persentase orang kreatif yang menjadi wirausaha	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Persentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program penelitian dan pengembangan	1 Persentase hasil litbang yang terpublikasikan	12	PD Pengampu Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Persentase kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				2 Persentase kenaikan kunjungan wisata	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				3 Persentase kunjungan wisatawan nusantara terhadap seluruh wisatawan	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				4 Persentase kunjungan wisatawan mancanegara terhadap seluruh wisatawan		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				5 Rata-rata lama tinggal wisatawan	2,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	15%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang
			Program Pengembangan Kemitraan	1 Persentase kerjasama pariwisata terhadap seluruh MOU	0,4	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Persentase kenaikan pendapatan Asli Daerah	5%	PD Pengampu Fungsi Penunjang Keuangan
			Program Pengembangan BUMD	2 Rasio Realisasi PAD	100	PD Pengampu Fungsi Penunjang Keuangan
				3 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15,31	PD Pengampu Fungsi Penunjang Keuangan
				1 Persentase kenaikan BUMD Berkinerja baik	70%	PD Pengampu Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana investasi Daerah	2 Persentase kenaikan Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	7,44%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang bidang keuangan
				1 Persentasi potensi investasi yang sudah memiliki FS	30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
			Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1 Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	82%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				2 Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	14%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
				3 Persentase UMKM memiliki perijinan	75%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1 Persen Kenaikan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0,1	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				2 Nilai Investasi	1,8 trilyun	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				3 Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA)	96	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				4 Rata-rata Lama Proses Perijinan (hari)	6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				5 Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP	83,33%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	6 Persentase implementasi SPIPISE	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				7 persentase investasi ramah lingkungan		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				1 Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi	18%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, PD Pengampu Urusan Penunjang Pemerintahan Umum, PD Fungsi Penunjang Perencanaan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SD	120 kata /menit	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Pendidikan
				2 Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMP	200 kata /menit	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMA	250 kata /menit	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Pendidikan
				4 Jumlah Perpustakaan	843	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
				5 Jml Pengunjung perpustakaan	271.502	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Pendidikan
				6 Jumlah referensi digital	1006	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
				7 Jumlah pelajar/mahasiswa yang berkunjung	190.051	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	1 Persentase komunitas olahraga aktif	37%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Rasio klub olahraga terhadap jumlah penduduk x10.000	1,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1 Persentase kenaikan prestasi olahraga tk prov , nasional	17%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1 Rasio gelanggang olahraga per 1000 penduduk	1,85	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
				2 Rasio lapangan olahraga /10.000 penduduk	0,0026	PD Pengampu Fungsi Penunjang Perencanaan dan Litbang
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1 Persentase organisasi pemuda yang berbadan hukum	45%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase organisasi pemuda yg difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan manajemen kepemudaan	9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
				3 Persentase organisasi pemuda aktif	60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1 Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi	9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1 Persentase peningkatan jumlah pemuda berwirausaha		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	1 Persentase pemuda dgn kasus narkoba thd seluruh kasus narkoba	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal	1 Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
				2 Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
1. Sumberdaya Manusia	IPM	67,54	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 APK PAUD	42,36	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1. Sumberdaya Manusia	Rata-rata lama sekolah	6,38				PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
1. Sumberdaya Manusia	Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke atas	97,41				PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
						PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Pendidikan Nonformal	2 Persentase PAUD formal yang terakreditasi	35%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				1 Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	24,00%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 APM SD	96,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				2 APM SMP	80,77	
				3 APK SD	103,75	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				4 APK SMP	100,18	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				5 Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	87,84	
				6 Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	97,01	
				7 Angka Putus Sekolah SD	0,064	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				8 Angka Putus Sekolah SMP	0,19	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				9 Angka Kelulusan (AL) SD	99,53	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				10 Angka Kelulusan (AL) SMP	100	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				11 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	95,93	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				12 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA	79,24	

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				13 Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	74,8%	
				14 Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	80,8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				15 Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	79%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Pendidikan Menengah	1 Persentase ruang kelas SMA yang memenuhi standar nasional pendidikan	89,4%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				2 Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	44,12	

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase indeks nilai sikap siswa SMA kategori baik	79%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	84,47	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				2 Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	96,44	
				3 Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	52,8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	1 persentase SD berakreditasi B	87,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				2 Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	83,5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase SMA minimal berakreditasi B	82,4	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				4 Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	7,32	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				5 Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	6,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Pendidikan Luar Biasa	6 Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	6,4	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				1 Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	1,36%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				2 Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	2,20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang memiliki website aktif	45%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pendidikan Non Formal	2 Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	39,71	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				4 Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	34	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				5 Rasio Guru/ Murid SMA/ MA (jumlah guru PNS SMA/ MA per 1000 murid SMA/MA)	38	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				1 Angka melek huruf penduduk 15 - 45 tahun	98,97	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1. Sumberdaya Manusia	Rata - rata usia harapan hidup	72,19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Ibu Hamil yang mendapat pelayanan antenatal (kunjungan kehamilan keempat/ K4)	91,78	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
	Angka Kematian Ibu	71,14		2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	6,78		3 Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	99,82%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Prevalensi Balita Gizi kurang	1,63%		5 Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	67,27%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Prevalensi balita Gizi Buruk	0,71%		6 Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan surveilans jamaah haji	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				7 Cakupan kunjungan nifas lengkap (KFL)	98,68%	
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1 Cakupan kesehatan bayi (kunjungan bayi)	99,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	2 Angka kelangsungan hidup bayi	99,42	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	98,38	
				5 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				1 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	99,82%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	94%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	45,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar	51,76%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Rasio kebutuhan : ketersediaan obat	1 : 0,7%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang memiliki izin	94%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				1 Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	58	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit	1 Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	76,98%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	86,10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Angka Kematian BBLR (1500gr - 2500gr) di Rumah Sakit	3,70%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	98,4%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	70 menit	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	6 Lama Tunggu Pelayanan Obat	23 menit	
				1 Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	66,68%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Cakupan Ketersediaan fasilitas gedung/ ruang pelayanan	84%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	3 Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	86,66 gr/ltr	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				1 Jumlah Puskesmas Yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	1,76 : 10.000	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penangan Gawat Darurat)	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Persentase Puskesmas Terakreditasi	60	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan yang Memiliki ijin Operasional	97,78%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 Penanganan penderita TB sesuai standar	100	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Prevalensi HIV (persen)	< 0,05%	
				3 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	25,98%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Persentase kasus DBD ditangani	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	< 25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				6 Persentase penemuan penderita diare	48,02%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				9 Penemuan kasus AFP Non Polio per 100.000 penduduk usia < 15	≥ 2	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				10 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam (persen)	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				11 Angka kesakitan malaria (API/ 1.000 penduduk)	< 0,7	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				12 Persentase penanganan penderita malaria	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				13 Persentase kasus filariasis yang mendapat pengobatan	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				14 Cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat	87,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular	1 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	< 23,4%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2 Persentase perempuan usia 30 -50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	2,50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen)	< 15,4	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Persentase merokok penduduk usia < 18 tahun	< 5,9%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Persentase penderita gangguan jiwa bebas pasung	96,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				1 Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	11,15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	65%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				3 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	64,37%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				4 Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	4,22%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Persentase anak balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				6 Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	1,76%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				7 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun) (persen)	16,11%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				8 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI balita usia 6-24 tahun dari keluarga miskin	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
						PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	1 Cakupan desa siaga aktif mandiri	8,28%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Cakupan rumah tangga sehat (persen)	74,6%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	3 Persentase posyandu dengan strata mandiri	24%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				1 Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	55%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				2 Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	86,00%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase Desa ODF	18,6	
				3 Persentase Tempat tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	71,69%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				4 Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	55%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				5 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah lingkungan	65%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	91,04%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				2 Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	50,60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	44,38%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				5 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosil ekonomi sejenis lainnya	43,2%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin	68,73%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	49,7	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program Pembinaan Anak Terlantar	1 Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	57,60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1 Persentase penyandang cacat dan trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1 Jumlah panti sosial	18	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
				2 Persentase panti sosial berbadan hukum	70%	

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	46%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1 Persentase PMKS mandiri		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Program pengembangan perumahan	1 Rasio Rumah Layak huni	0,900	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman
				2 Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	31966	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman
			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1 persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	4%	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
	Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar	66,92%	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1 Cakupan rumah layak huni terjangkau	6%	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman
			Program pengelolaan areal pemakaman	1 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum/jumlah penduduk)x1000	890	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	1 Persentase KK ber akses sanitasi layak	44,51	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2 Persentase Kawasan Kumuh perkotaan	0,199	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	8,5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Penunjang Perencanaan, Bidang Pekerjaan umum dan Pentataan Ruang
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	92,67%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Penunjang Perencanaan, Bidang Pekerjaan umum dan Pentataan Ruang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal	2,85%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Penunjang Perencanaan, Bidang Pekerjaan umum dan Pentataan Ruang
				3 persentase desa yang memiliki BPSPAM	71,000%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Penunjang Perencanaan, Bidang Pekerjaan umum dan Pentataan Ruang
				4 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	20,730%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Penunjang Perencanaan, Bidang Pekerjaan umum dan Pentataan Ruang
				5 Persentase penduduk berakses sanitasi	74,20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM		2018	PD PENGAMPU URUSAN
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	66,77%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang	26%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang., Fungsi Penunjang Perencanaan
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	58,500%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang., Fungsi Penunjang Perencanaan
				2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	64,255%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang., Fungsi Penunjang Perencanaan
				3	persentase jumlah jembatan kondisi baik	70,42%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM		2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Tingkat kemantapan jalan	65%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				2	Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				3	Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	1	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	0,675	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
					Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase panjang jalan yang dileger	1%	
			Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	1 Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	0,9	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				2 Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	1	PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang	0,685	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				2 Rasio drainase lingkungan permukiman kondisi baik dan sedang	0,445	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dilengkapi saluran drainase	86,000%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman
				4 Persentase penurunan Jumlah titik genangan (luapan limpasan saluran) pada jalan utama perkotaan	8	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				5 Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	68,500%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
			Program penyediaan dan pengelolaan air baku	1 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal	86,000%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PD pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1 Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	0,753	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Rasio jaringan irigasi	0,086	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				3 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan kabupaten	68,64%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				4 Persentase jaringan Irigasi Kabupaten kondisi Baik	72,535	
			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Persentase kenaikan kepersertaan pekerja dalam jaminan kesehatan	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				2 Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	3 Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif	82%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				4 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	2	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	IPG	94,32		1 Persentase Anggaran Responsif gender	6,01	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	IDG	46,71		2 Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA	15	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	2,59		3 Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1 Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2 Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangan	100	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3 Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4 Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	55	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	38,93	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2 Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	6,04	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3 Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	45,63	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	66,51	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Rasio KDRT perempuan (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	4,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	18%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3 Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	97,89	
				4 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	3,02	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				5 Persentase desa ramah anak	4,9	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				6 Persentase puskesmas ramah anak	24,60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Persentase sekolah ramah anak	6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
						Pendidikan
	Total fertility Rate (TFR)	2,18	Program Keluarga Berencana	1 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,55		2 CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif)	82,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4 Rasio petugas KB /desa	2,66	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				5 Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 (Angka Kelahiran Menurut Golongan Umur)	75	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program pelayanan kontrasepsi	1 Unmetneed	7,79	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2 Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera	55	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3 Prsentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	43,5	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4 Drop out KB	14,89	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				5 % Kebersertaan KB Pria	3,1	
			Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	454	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Keluarga	2 % anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,36	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	225	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansis (BKL) yang terbentuk dan terbina	25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program kesehatan reproduksi remaja	1 Rata-rata usia kawin pertama perempuan	17,3 th	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2 Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	19	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3 % Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	2,76	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	95	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				2 Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun)	99,6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3 Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	80	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
	% Penduduk Berakte kelahiran	86,23%		4 Rasio kepemilikan akta kematian	40	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
	% Penduduk Ber KTP	98,54%		5 Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	30	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				1 Persentase lahan tanah aset daerah yang disertifikatkan (Jumlah luas lahan bersertifikat/Jumlah Penduduk)x100%	56,86	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang pertanahan
				2 Persentase lahan tanah aset desa yang disertifikatkan	15	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang pertanahan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan	1 Persentase Penyelesaian kasus tanah negara (jumlah kasus yang diselesaikan/ jumlah kasus yang terdaftar)x100%	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang pertanahan
				2 Persentase Penyelesaian ijin lokasi(jumlah ijin lokasi/ permohonan ijin lokasi)x100%	100%	
2. Infrastruktur	Indeks Gini	0,26	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkari	20%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Infrastruktur	Indeks Wiliamson	0,33	Program perencanaan Parastrana Wilayah dan SDA	2 Persentase Panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				1 Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/ Luas wilayah)	79,6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1 Persentase panjang jalan antar desa status kabupaten dalam kondisi baik	85,34	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Persentase KSCT (kawasan strategis cepat tumbuh) yang dilegalisasi	45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Program Perencanaan wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Persentase kenaikan Jumlah desa yang menjadi pusat pertumbuhan	9	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Persentase jalan lingkar baru yang terbangun terhadap rencana jalan lingkar yang ditetapkan	70	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
				2 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	4 ruas	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase simpang jalan strategis simpang jalan perkotaan yang dilakukan perhitungan LHR pada jam sibuk	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				4 Persentase spot parkir on street yang tertata	75%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				5 Persentase tersedianya gedung parkir	20%	
				6 persentase tersedianya halte terhadap total kebutuhan halte	20	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				7 rasio jumlah kendaraan (unit SMP) per panjang jalan (km)	95	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 persentase tersedianya perlengkapan jalan (rambu , marka, dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	84%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Angka fatalitas korban kecelakaan transpostasi jalan	Menurun	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				3 Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi	67%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Persentase angkutan umum laik pakai	80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				2 Persentase Pelayanan angkutan jalan	92,50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				3 Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil	69	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				4 Rasio ijin trayek	0,50	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				5 Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor	65,67%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Persentase panjang jalan kabupaten pada lokasi geometri pegunungan/perbukitan yang terpasang guard rail		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				2 Persentase titik blackspot yang tertangani		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				3 Persentase dunia usaha wajib andalalin yang menyusun dokumen ANDALALIN		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
4. Daya Saing	Persentase Angka Kemiskinan	16,42%	Program upaya kesehatan masyarakat miskin	1 Cakupan jaminan kesehatan masyarakat rumah tangga miskin	91,04%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Daya Saing	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,24	Program perbaikan gizi masyarakat	1 Persentase Balita /Gizi Kurang dari keluarga miskin yang tertangani	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Daya Saing	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,025		2 Persentase Balita Gizi buruk dari keluarga miskin yang tertangani	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Program Pendidikan Dasar 9 tahun	1 Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,7	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pendidikan Menengah	1 Rasio APK SMA penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,67	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Penataan Administrasi kependudukan	1 Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 Persentase ruta miskin berakses air minum		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Lingkungan Sehat	1 Persentase ruta miskin berakses sanitasi layak	65	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2 Persentase ruta miskin yang akses listrik		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
4. Daya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,82	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	1 persentase Rata miskin yg mampu menjadi wira usaha	5%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Daya Saing	Partisipasi Angkatan Kerja	75,23				
4. Daya Saing	Dependency Ratio	54,6				
4. Daya Saing	Tingkat Kesempatan Kerja	94,74				
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Persentase Pencari Kerja Teraftar yang ditempatkan	49,24%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2 Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	17%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				3 Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				1 persentase RUTA miskin yg mendapat akses permodalan		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
			Program peningkatan keberdayaan masyarakat	1 Jumlah kelompok masyarakat produktif	150	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program pengembangan lembaga ekonomi desa	1 Jumlah BUMDes	40	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2 Persentase BUMDes aktif	88%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam membangun desa	1 Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	30%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2 Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	17	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase pokmas aktif	60%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4 Rata- rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat	15%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Perencanaan pembangunan ekonomi	1 Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	6%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
				2 Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	6%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
				3 Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP	2	

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
2. Infrastruktur	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,59	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	84,38%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2 Persentase RDTR yang dilegalisasi	7	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang	1 Persentase luas permukiman yang tertata	82,50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				2 Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG	25	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
2. Infrastruktur	Ketaatan terhadap RTRW	62,15%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	22,50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Persentase Kualitas sumber mata air Kelas A	88%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				2 Indeks Kualitas udara	74%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				3 Indeks kualitas air sungai	65	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				4 Indeks tutupan vegetasi	91,28	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				5 Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	38%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	13	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				3 Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kab. Wonosobo	30	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				4 Rasio motivator lingkungan thd 10000 penduduk	53	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (ber-HPL/HGB)	0,292	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/Perumahan Permukiman/Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Fungsi Penunjang Perencanaan
				2 Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	39,39	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/Perumahan Permukiman/Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Fungsi Penunjang Perencanaan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	80%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup/Perumahan Permukiman/Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Fungsi Penunjang Perencanaan
			Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1 Persentase luas lahan rusak akibat pertambangan	0,020	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program peningkatan pengendalian polusi	1 Indeks kualitas air sungai	65	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				2 Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi	25%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				3 Persentase usaha yang memiliki IPAL thd industri wajib IPAL	41%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Persentase luas lahan kritis pada lahan budidaya dan lindung di luar hutan	32,46%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				2 Persentase sumber mata air yang rusak	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				3 Persentase tutupan vegetasi	74,83%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				4 Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH	0,48	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Persentase penanganan sampah	33,47	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman
				2 Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,6	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				3 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman
				4 Persentase pengoperasian TPA	35%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman
				5 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan	3	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman
				6 Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan	13,10%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman
				7 Persentase RW yang memiliki bank sampah	55,70%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan dan Permukiman

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1 persentase luasan lahan pertanian/perkebunan ramah lingkungan (pertanian organik, pertanian sesuai kaidah konservasi)	2	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				2 rasio petani yang melakukan usaha pertanian organik	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				3 persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap total komoditas pertanian	8%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	84,00%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
				2 Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara		PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				3 Persentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	88	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Persentase peningkatan jumlah spesies flora fauna terancam yang terselamatkan	3%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
				2 Indeks keanekaragaman hayati	1	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1 Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	88%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
2. Infrastruktur	Rasio eletrifikasi rumah tangga		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1 Persentase rumah tangga yang teraliri listrik (elektrifikasi)	100%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum.
				2 Rasio ketersediaan daya listrik	110%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum.
				3 persentase PLTMH yang beroperasi	4,29	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum. PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM		2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi	1	Persentase desa yang mengembangkan biogas	1 per tahun	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
2. Infrastruktur	Indeks Resiko Bencana	127,2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	57%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		127,2		2	Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system)	11%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
				3	persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	45	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM		2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	4	rapor ketangguhan bencana	baik	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
				5	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	56,00%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat. PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
				1	Persentase desa siaga bencana	40%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
				2	persentase sekolah tanggap bencana	85%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

PRIORITAS	INDIKATOR (MAKRO)	2018	PROGRAM (Permendagri 13/2006)	INDIKATOR PROGRAM	2018	PD PENGAMPU URUSAN
			Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1 capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan atas kawasan potensi kebakaran	1	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat (bencana)
				2 cakupan pelayanan bencana kebakaran	95%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat (bencana)
				3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	50%	PD Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat (bencana)

Sebagai indikator pembangunan secara makro, dirumuskan target makro pembangunan tahun 2018 yang dibagi menjadi 45 indikator capaian makro pembangunan daerah. Target tersebut berdasarkan pada target capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan dan memperhatikan target capaian yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 sebagai acuan dasar penentuan target tahun 2018. Indikator pembangunan ini untuk mengetahui secara makro kondisi pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2018. Berikut target indikator makro pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2018 :

Tabel IV.4

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN KINERJA
			2018
Tujuan I : Meningkatkan Rasa Kemanusiaan, Toleransi dan keharmonisan untuk hidup			
Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	1.	Indeks Demokrasi	74
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	2.	Indeks Toleransi	> 0.49
Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	3.	Indeks Gotong Royong	0,58
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4.	indeks rasa aman	0,63
Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa			
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	5.	Indeks Reformasi Birokrasi	82
	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	72
Tujuan III : Meningkatkan produktifitas, Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya dan Membangun Budaya Berdikari			
Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah	7.	PDRB ADHB (juta rupiah/tahun)	22.003.820
	8.	PDRB ADHK (juta rupiah/tahun)	13.667.495
	9.	Nilai Tukar Petani	114
	10.	Laju Inflasi	3,25
	11.	Pertumbuhan Ekonomi	6

SASARAN	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN KINERJA
			2018
	12.	Indeks Ketahanan Pangan	88,6
Meningkatnya daya saing daerah	13.	Produktivitas Daerah	30,61
	14.	PDRB per Kapita (juta rupiah)	17,26
	15.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,18
Tujuan IV : Terwujudnya Pertumbuhan yang Berkeadilan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan			
Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	16.	IPM	67,54
	17.	Rata-rata Lama Sekolah	6,38
	18.	Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun ke atas	97,41
	19.	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	72,19
	20.	Angka Kematian Ibu	71,14
	21.	Angka Kematian Bayi	6,78
	22.	Prevalensi Balita Gizi kurang	1,63%
	23.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,71%
	24.	Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar	66,92%
	25.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	66,77%
Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	26.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	94,32
	27.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	46,71
	28.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	2,59
	29.	TFR (Total Fertility Rate)	2,18
	30.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,55
	31.	Prosentase Penduduk Berakte Kelahiran	86,23%
	32.	Presentase Penduduk Ber KTP	98,54%
Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	33.	Indeks Gini	0,26

SASARAN	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN KINERJA
			2018
Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	34.	Indeks Williamson	0,34
	35.	Persentase Angka Kemiskinan	16,42%
	36.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,24
	37.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,025
Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	38.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,82
	39.	Partisipasi Angkatan Kerja	75,23
	40.	Depedency Ratio	54,6
	41.	Tingkat Kesempatan Kerja	94,76
Tujuan V : Terwujudnya Prinsip Berkelanjutan dan Berkesinambungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Memperhatikan Prinsip Keseimbangan			
Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	42.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,59
	43.	Ketaatan Terhadap RTRW	62,15%
Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan	44.	Rasio elektrifikasi rumah tangga	90%
Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	45.	Indeks Resiko Bencana	129,8

D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Kabupaten

Wonosobo

Kabupaten Wonosobo, memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah tengahnya wilayah provinsi Jawa Tengah. Namun demikian Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat permasalahan utama, yaitu keterisolan intra dan ekstra wilayah, masih adanya ketimpangan wilayah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Pengembangan wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan memperhatikan potensi dengan penciptaan dan penyebaran pusat pusat pertumbuhan yang didukung keadilan infrastruktur wilayah, guna mencapai :

- Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah dengan penyebaran pusat pusat pertumbuhan;
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah menuju percepatan dan pemerataan pertumbuhan;
- Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;

d. Pembangunan dan pengembangan desa dan kawasan perdesaan

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki potensi pengembangan wilayah melalui pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan melalui pengembangan Kawasan Perkotaan yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) artinya adalah pengembangan kawasan segitiga Selomerto-Wonosobo - Kertek untuk mendorong ekonomi wilayah Kabupaten Wonosobo, yang tentunya perlu didukung pengembangan kawasan koridor jalan kolektor, yang meliputi:

- a. Sawangan – Wonosobo;
- b. Koridor Wonosobo – Kertek
- c. Koridor Kertek – Kledung dan
- d. Koridor Kertek – Sapuran.

Disamping itu untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi wilayah diperlukan pengembangan sentra-sentra industri kecil di wilayah kabupaten Wonosobo; Pengembangan kawasan agropolitan Rojonoto; Pengembangan kawasan Perbatasan; Pengembangan pariwisata berkelanjutan;